

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andrianto, N., 2007. *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Basri, Yuswar Zainul, dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Bungin Burhan, 2007, *metode penelitian kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budi Winarno , 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Budi Wiyoto, 2005, *Good Governance*, Jakarta : Rineka Cipta
- Creswell, John W. 1998 *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publicatons Inc.
- Dasril Munir dkk., 2004, *Kebijakan dan Managemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: YPAPI.
- Deddi Nordiawan, 2007, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung.
- Didjaja Mustopa, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid Muhammad ,2003, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, lembaga penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012, *pengelolaan keuangan daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta :Erlangga
- Iqbal Muhammad, 2007, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Irfan Muh, 2006, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Jay M. Shafritz & E.W. Russel, 1997. *Performance Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Logos.2005 *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- \_\_\_\_\_. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyana, 2006, *Aparatur Pemerintah Daerah*, Erlangga, Jakarta.

- Moleong, Lexi J., 2012, *Metode Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Suhanda, 2007, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusatama Yogyakarta.
- Tjahjanulin, Domai. 2002. "*Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah*". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Sarundajang, 2005, *Manajemen Sektor Publik*, Gramedia, Jakarta
- Suwignjo, 2000, *Kepemimpinan Dan Integritas Tinggi*, Gramedia, Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.

### **Desertasi, Tesis dan Jurnal**

- Andri Putra Kesmawan, 2014 "*Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*", Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana-UMY.
- Basri, 2008 "*Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. Populasi penelitian ini adalah anggota DPRD Propinsi Riau dan Kota Pekanbaru*", Jurnal MAKARA, SAINS, Vol.11, No.1, April 2008.
- Douglas N. Harris and Carolyn D. Herrington, 2006. *Accountability, Standards, and Growing Achievement Gap : Lessons from the Past Half-Century. American Journal of Education*. Vol.112. Iss. 2. Feb. 2006. Chicago.
- Harkristuti, 2003, "*Upaya Mewujudkan Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Di Skpd, Jurnal Akuntanssi Pemerintahan Jurnal Kebangsaan*, Vol.2 No.1 Januari 2003.
- Kurnia Sari Nur Pangesti, 2008, "*Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: studi kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*", Disertasi, tidak dipublikasi. Bandung: Program Pascasarjana-UNPAD.
- Kusmayadi, 2005 "*Upaya mewujudkan good government governance melalui pengelolaan keuangan daerah, dengan objek penelitian kabupaten-kabupaten Indonesia*". Disertasi, tidak dipublikasi. Bandung: Program Pascasarjana-UNPAD.
- Mulyana, Budi, 2006, "*Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*", Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Riodinar Harianja, 2008, "*Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir*" Jurnal Akutansi dan Keuangan, 11 (2).

- Safitri, Ratna Amalia, 2009, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2009).
- Sopannah dan Wahyudi, 2004 “*Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Malang*” Jurnal Kebangsaan, Vol.1 No.1 Januari 2004.
- Sudarmayanti, 2010 “*Transparansi Pengelolaan Anggaran Desa Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2009*” Tesis, Makassar : Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Warisno, 2009 “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Janbi*” Tesis, Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra utara

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Website**

<http://www.Sumsel.com>, diakses selasa, 12 Mei 2015.

<http://www.TRIBUNnews.com>,diakses selasa 12 Mei 2015.

<http://www.Tempo.com>. diakses selasa 12 Mei 2015.